

PENGARUH PENATAUSAHAAN ASET TETAP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDA ACEH PEMERINTAH ACEH

Aziiz Saputra

NPP. 30.009

Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Program Studi Keuangan Publik

Email: aziizs931@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Dedeh Maryani, M.M

ABSTRACT

The number of administrative errors in fixed assets in Banda Aceh City has tended to decrease since 2018. However, the Audit Board of Indonesia (BPK) continues to find weaknesses in asset bookkeeping, inventory, and reporting, indicating that the management of fixed assets is not yet fully optimal and may affect the quality of local government financial reports. This study aims to examine (1) the implementation of fixed asset management, (2) the quality of the Banda Aceh City Government's financial statements, and (3) the influence of fixed asset management on the quality of the Banda Aceh City Government's financial statements. This research is used a quantitative method. The research sample consisted of 32 civil servants working in the Financial and Regional Asset Division of the BPKK (Financial and Asset Management Agency) of Banda Aceh City. The sampling technique used was saturated sampling. Data were collected through questionnaires and documentation. Data were analyzed using simple linear regression tests. The findings are showed that (1) the management of fixed assets in Banda Aceh City including bookkeeping, inventory, and reporting has been carried out properly, (2) the quality of the financial statements of the Banda Aceh City Government, assessed based on relevance, reliability, comparability, and understandability, falls into a good category, and (3) there is a significant influence of fixed asset management on the quality of local government financial statements in Banda Aceh City, with a contribution of 63.6%.

Keywords: *Fixed Asset Management, Financial Statement Quality*

ABSTRAK

Jumlah kesalahan administrasi aset tetap Kota Banda Aceh cenderung menurun sejak tahun 2018, namun masih terdapat temuan dari BPK terkait kelemahan dalam pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset, yang menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya optimal dan dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap, (2) kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dan (3) pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh. Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Sampel penelitian yaitu aparatur sipil negara yang berada di BPKK Kota Banda Aceh bagian keuangan dan aset daerah sebanyak 32 orang. Teknik sampling menggunakan sampling jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Analisis data menggunakan uji regresi linier sederhana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) Penatausahaan aset tetap di Kota Banda Aceh yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sudah dilaksanakan dengan baik, (2) Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Banda Aceh yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami berada dalam

kategori yang baik, (3) Terdapat pengaruh signifikan penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Banda Aceh dengan kontribusi sebesar 63,6%.

Kata Kunci : Penatausahaan Aset Tetap, Kualitas Laporan Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca-reformasi 1998 ditandai dengan pergeseran dari sistem sentralistik menuju desentralistik. Penerapan desentralisasi ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, kewajiban, sekaligus wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah memberikan kewenangan luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi dan sumber keuangannya sendiri melalui desentralisasi fiskal (Yani, 2013). Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan menciptakan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan secara adil. Hal ini diwujudkan melalui pemberian kewenangan fiskal yang proporsional kepada pemerintah daerah, termasuk kewenangan dalam mengelola sumber pendapatan asli daerah, dana transfer, serta berbagai potensi keuangan lainnya. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai bentuk akuntabilitas, pemerintah daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun. LKPD ini harus berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 serta Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Kualitas LKPD kemudian dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini atas kewajarannya, yaitu *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*, *Wajar Dengan Pengecualian (WDP)*, *Tidak Wajar (TW)*, atau *Tidak Memberikan Pendapat (TMP)*, berdasarkan kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Sebagaimana dinyatakan bahwa “Guna menjalankan tugas dan pokoknya BPK diberi posisi yang sangat tinggi, hal ini serasi dengan tanggung jawab BPK yang bebas serta mandiri” (Akbar, 2013). BPK melakukan pengawasan terhadap keuangan Negara.

Salah satu faktor penting yang menentukan kualitas LKPD adalah penatausahaan aset tetap. Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, penatausahaan mencakup rangkaian kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset. Apabila penatausahaan tidak dilakukan secara tertib, akan berpengaruh signifikan terhadap penyajian neraca dan kewajiban laporan keuangan. Data BPK dalam IHPS I Tahun 2021 mencatat bahwa pada LKPD tahun 2020 masih terdapat 1.008 kasus pencatatan aset yang tidak akurat, 463 kasus proses penyusunan laporan yang tidak sesuai ketentuan, serta 176 kasus kelemahan sistem informasi akuntansi. Temuan ini memperlihatkan masih lemahnya aspek administrasi aset di berbagai pemerintah daerah. Fenomena serupa juga terjadi di Kota Banda Aceh. Meskipun pada periode 2017–2021 pemerintah kota memperoleh opini WTP secara berturut-turut dari BPK, namun laporan pemeriksaan BPK masih menemukan kelemahan dalam penatausahaan aset tetap, seperti kesalahan pencatatan nilai

aset, belum lengkapnya inventarisasi, ketidakjelasan dokumen kepemilikan, serta pelaporan yang belum memadai.

Kondisi paradoks, yakni capaian opini WTP di satu sisi dan masih ditemukannya kelemahan signifikan dalam penatausahaan aset tetap di sisi lain, menunjukkan perlunya evaluasi akademik yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Banda Aceh.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan dalam penatausahaan aset tetap masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan IHPS I Tahun 2020, terdapat 1.008 kasus pencatatan aset yang belum dilakukan atau tidak akurat, 463 kasus penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, serta 176 kasus kelemahan sistem informasi akuntansi dan pelaporan. Data ini memperlihatkan bahwa persoalan mendasar dalam laporan keuangan pemerintah daerah terletak pada lemahnya administrasi aset tetap.

Fenomena tersebut juga terjadi di Kota Banda Aceh. Meskipun pemerintah daerah telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut sejak tahun 2017 hingga 2021, namun temuan BPK menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap. Beberapa catatan yang berulang antara lain kesalahan pencatatan jumlah dan nilai aset, inventarisasi yang belum menyeluruh, belum adanya penilaian aset secara komprehensif, serta ketidakjelasan status kepemilikan dan dokumen pendukung. Kondisi paradoks ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi antara capaian opini WTP dengan realitas penatausahaan aset di lapangan.

Kesenjangan semakin nyata ketika melihat bahwa sejumlah penelitian terdahulu memang telah membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan daerah, namun belum ada penelitian yang secara khusus menyoroti konteks Kota Banda Aceh yang mengalami fenomena unik yaitu memperoleh opini WTP tetapi masih menghadapi kelemahan serius dalam pengelolaan aset tetap.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari sejumlah penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian (Sundari, 2018) yang dilakukan pada KPKNL Bandung menemukan bahwa pengelolaan aset tetap berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan kontribusi sebesar 35,3%. Hasil ini menunjukkan pentingnya pengelolaan aset yang tertib agar laporan keuangan dapat disajikan secara andal. Selanjutnya, (Kumianto, 2017) meneliti pada Pemerintah Kabupaten Magelang dan membuktikan bahwa penatausahaan Barang Milik Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menegaskan bahwa tertib administrasi aset sangat berperan dalam menentukan kualitas LKPD. Penelitian (Anggraeni, 2015) di Kota Pagar Alam juga memperlihatkan bahwa pengelolaan aset daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini menekankan bahwa semakin baik tata kelola aset, semakin meningkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, (Nurpadi, 2021) mengkaji di Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan menambahkan variabel penerapan SIMAK-BMN. Hasilnya menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap dan penerapan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Konsistensi hasil penelitian juga terlihat dalam studi (Widiati, E., 2021) di Kabupaten Bandung yang menyatakan bahwa penatausahaan aset tetap memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian pula dengan penelitian (Reinelda, R., 2022) di Kabupaten Lombok Barat yang menegaskan pengaruh signifikan penatausahaan aset terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian (Anggraeni, 2015) pada Kementerian Agama Kota Probolinggo menambahkan aspek variabel pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, dan hasilnya menunjukkan bahwa ketiganya secara simultan dan parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian, penelitian (Febrianti, 2016) di Kabupaten Kubu Raya juga menunjukkan bahwa pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, secara parsial, variabel inventarisasi justru berpengaruh negatif, berbeda dengan pembukuan dan pelaporan yang berpengaruh positif signifikan. Selanjutnya, penelitian (Iqbal, 2022) di Kabupaten Karo menemukan bahwa penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga semakin baik penatausahaan, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Terakhir, penelitian (Maulana, 2022) di Kota Palembang menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil uji hipotesis dalam penelitiannya menolak H_0 dan menerima H_a , yang artinya kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh praktik penatausahaan aset tetap.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan pada pemerintah daerah di berbagai wilayah, seperti Kabupaten Magelang (Kumianto, 2017), Kota Pagar Alam (Anggraeni, 2015), Kabupaten Lombok Barat (Reinelda, R., 2022), Kabupaten Karo (Iqbal, 2022) dan Kota Palembang (Maulana, 2022). Namun, penelitian ini secara khusus menyoroti konteks Kota Banda Aceh yang memiliki fenomena unik yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut, tetapi masih ditemukan kelemahan serius dalam penatausahaan aset tetap berdasarkan temuan BPK. Fokus ini belum pernah diangkat dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu ada yang menggunakan variabel independen umum berupa *pengelolaan aset daerah* ((Anggraeni, 2015), (Sundari, 2018)), serta ada yang menggabungkan dengan sistem informasi manajemen (Nurpadi, 2021). Namun, penelitian ini secara spesifik menekankan tiga indikator penatausahaan aset tetap, yaitu Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan. Fokus indikator ini serupa dengan penelitian (Maulana, 2022), (Iqbal, 2022), (Febrianti, 2016), dan (Anggraeni, 2015), tetapi berbeda dengan penelitian yang menggunakan indikator umum atau variabel tambahan lain. Perbedaan terletak pada objek penelitian (Kota Banda Aceh) serta pengaitan langsung dengan hasil pemeriksaan BPK terbaru.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penatausahaan aset tetap, menilai kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta menganalisis pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas LKPD Kota Banda Aceh.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk mengetahui pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis hubungan antarvariabel melalui pengujian hipotesis. Pemilihan desain harus mempertimbangkan tujuan penelitian serta jenis data yang akan digunakan (Creswell, J. W., & Creswell, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada aparatur sipil negara yang bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, khususnya di bagian keuangan dan aset daerah, dengan jumlah responden sebanyak 32 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh, di mana seluruh populasi dijadikan sampel karena jumlahnya relatif kecil. Sebagaimana dikemukakan bahwa “teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel” (Sugiyono, 2017).

Selain kuesioner, peneliti juga menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data sekunder terkait laporan hasil pemeriksaan BPK, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya yang mendukung penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan. Keterkaitan antara variabel bebas dan terikat sebagaimana dijelaskan oleh (Neuman, 2013) adalah “*The independent variable is ‘independent of’ prior cause that have acted on it whereas the dependent variable depends on the cause*”, sehingga variabel penatausahaan aset tetap dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel independen, sedangkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel penatausahaan aset tetap dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel independen, sedangkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Adapun indikator variabel penatausahaan aset tetap mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, sedangkan indikator kualitas laporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang meliputi relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sinurat (2018) menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus ada dalam informasi akuntansi agar dapat mencapai tujuannya, yaitu menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, meskipun tidak selalu ditampilkan langsung pada lembar muka laporan keuangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dipaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari data kuesioner dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier sederhana. Selanjutnya, hasil penelitian dibahas dengan mengaitkan pada teori, regulasi, dan penelitian terdahulu untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.

3.1 Deskripsi Variabel Penatausahaan Aset Tetap

Penatausahaan aset tetap di Kota Banda Aceh diukur melalui tiga indikator, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penatausahaan aset merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan barang milik daerah yang harus dicatat oleh pengguna maupun pengelola barang sesuai ketentuan perundang-undangan (Suwanda, 2013). Dengan demikian, penatausahaan aset dapat dipahami sebagai proses pencatatan, pengelolaan, penyediaan, distribusi, dan penyimpanan aset daerah secara tertib untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Berikut ini hasil analisis deskriptif variabel penatausahaan aset tetap.

Tabel 1.

Rekapitulasi Analisis Deskriptif Variabel Penatausahaan Aset Tetap (X)

Indikator	Persen (%)	Kategori
Pembukuan	70,96	Baik
Inventarisasi	71,35	Baik

Pelaporan	71,11	Baik
Rata-rata	71,14	Baik

Sumber: Hasil olah data kuesioner, 2023

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa penatausahaan aset tetap di Kota Banda Aceh yang diukur melalui tiga indikator, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, menunjukkan hasil rata-rata pada kategori baik. Indikator inventarisasi memperoleh persentase tertinggi sebesar 71,35%, yang mengindikasikan bahwa proses pendataan dan pencatatan aset daerah telah dilaksanakan dengan cukup tertib. Hal ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memastikan aset yang dimiliki tercatat dengan baik. Hasil analisis terhadap indikator inventarisasi menunjukkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh telah berupaya melaksanakan kegiatan inventarisasi aset tetap secara menyeluruh. Proses sensus dan pengamanan aset tetap sudah dilakukan sehingga meminimalkan potensi kehilangan maupun kesalahan pencatatan. Selain itu, aset yang mengalami mutasi juga telah dicatat dengan baik, sehingga pergerakan aset dapat terpantau secara jelas. Inventarisasi tidak hanya berhenti pada pendataan, tetapi juga disajikan tepat waktu untuk selanjutnya dilaporkan, yang menandakan adanya komitmen terhadap ketertiban administrasi. Pemerintah daerah juga melaksanakan inventarisasi pengguna dan pengelola barang secara periodik, sehingga posisi dan pengelolaan aset dapat dipantau secara berkelanjutan. Lebih lanjut, inventarisasi barang milik daerah berupa persediaan maupun konstruksi dalam pengerjaan dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari siklus pengelolaan aset. Temuan ini mengindikasikan bahwa kegiatan inventarisasi aset tetap di Kota Banda Aceh telah berjalan dengan baik, meskipun tetap memerlukan penyempurnaan, terutama dalam memastikan kelengkapan data dan konsistensi pelaporan hasil inventarisasi. Hal ini penting agar setiap aset daerah dapat terkelola dengan lebih efektif dan mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal. Selanjutnya, indikator pelaporan memperoleh persentase sebesar 71,11% yang juga berada dalam kategori baik. Hasil ini menandakan bahwa mekanisme pelaporan aset tetap telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hasil analisis pada indikator pelaporan menunjukkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan kewajiban pelaporan aset tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kuasa pengguna barang menyusun laporan secara berkala dan menyampaikannya kepada pengelola barang, sehingga alur informasi aset tetap dapat berjalan dengan teratur. Seluruh laporan tahunan maupun lima tahunan telah dihimpun sebagai bagian dari akuntabilitas pengelolaan aset, dan hasilnya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan neraca daerah. Proses pelaporan juga memperlihatkan adanya perhatian terhadap hasil sensus aset yang direkap ke dalam buku inventaris serta dilaporkan tepat waktu. Mutasi barang tercatat dengan baik, dan perubahan tersebut juga dilaporkan secara tepat waktu sehingga tidak menimbulkan selisih data antara kondisi riil dan catatan administrasi. Selain itu, laporan inventarisasi telah disusun dengan memuat informasi penting seperti nilai, tipe, dan merek barang, yang menjadikan laporan lebih transparan dan informatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme pelaporan aset tetap di Kota Banda Aceh telah berjalan dengan cukup baik, walaupun tetap diperlukan penguatan konsistensi dan keakuratan agar laporan yang dihasilkan semakin dapat diandalkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan keuangan daerah. Indikator pembukuan memperoleh persentase 70,96% dengan kategori baik. Capaian ini menunjukkan bahwa pencatatan aset daerah secara umum telah dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP). Akan tetapi, temuan BPK pada periode 2018–2021 memperlihatkan masih adanya kelemahan dalam pencatatan aset tetap, seperti aset yang belum didukung dokumen kepemilikan yang jelas maupun aset yang nilainya belum diperbarui. Hal ini menegaskan bahwa kualitas pembukuan perlu terus ditingkatkan agar dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil analisis pada indikator pembukuan menunjukkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan pencatatan aset tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengguna maupun kuasa pengguna barang telah menyusun Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris

Ruangan (KIR) sebagai dokumen dasar dalam pencatatan aset. Selain itu, pencatatan juga dilengkapi dengan Buku Inventaris (BI) yang memuat informasi lebih rinci mengenai kondisi dan status aset yang dimiliki. Setiap transaksi yang terkait dengan aset tetap telah didukung oleh bukti yang sah sehingga proses pencatatan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Pendaftaran dan pencatatan aset dilakukan secara konsisten, termasuk pengelompokan dan kodifikasi yang memudahkan pengendalian serta penelusuran aset. Pemerintah daerah juga telah menghimpun daftar barang pengguna untuk kemudian disusun menjadi daftar barang milik daerah, sehingga pengelolaan aset dapat dipantau secara menyeluruh dan terstruktur.

Secara keseluruhan, rata-rata persentase variabel penatausahaan aset tetap sebesar 71,14% berada pada kategori baik. Hasil ini memberikan gambaran bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan penatausahaan aset tetap secara cukup baik, namun masih menyisakan ruang perbaikan dalam hal pembukuan. Kelemahan dalam pembukuan dapat berdampak pada ketidakakuratan data aset, potensi kehilangan informasi terkait nilai maupun kondisi aset, serta menghambat proses pengambilan keputusan dalam penatausahaan aset tetap. Dengan demikian, perlu adanya penguatan sistem informasi manajemen aset, peningkatan kapasitas SDM yang bertugas di bidang penatausahaan, serta penerapan mekanisme pengendalian internal yang lebih ketat.

3.2 Deskripsi Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur melalui empat indikator, yaitu relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Tujuan dari pelaporan keuangan tersebut adalah “untuk menyajikan suatu Informasi yang berguna bagi pengguna aset dalam menilai suatu akuntabilitas dan pembuatan keputusan” (Mahmudi, 2010). Berikut ini hasil analisis deskriptif variabel kualitas laporan keuangan.

Tabel 2.

Rekapitulasi Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Indikator	Persentase	Kategori
Relevan	70,22%	Baik
Andal	71,85%	Baik
Dapat dibandingkan	70,94%	Baik
Dapat dipahami	72,63%	Baik
Rata-rata	71,41%	Baik

Sumber: Hasil olah data kuesioner, 2023

Tabel 2 menyajikan rekapitulasi hasil analisis deskriptif terhadap variabel kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Berdasarkan data, indikator relevan memperoleh persentase sebesar 70,22% yang termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah memiliki umpan balik yang baik bagi para pengguna, memberikan manfaat prediktif dalam mendukung pengambilan keputusan, disusun tepat waktu, serta disajikan secara lengkap. Dengan demikian, aspek relevansi laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh telah terpenuhi sehingga kualitas laporan keuangan cukup baik. Selanjutnya, indikator andal mencapai 71,85% dengan kategori baik. Indikator dapat dibandingkan menunjukkan nilai 70,94%, juga berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah memenuhi aspek perbandingan baik secara internal antarperiode maupun secara eksternal dengan entitas pemerintah lainnya. Pemenuhan aspek ini menunjukkan konsistensi dalam penyajian laporan keuangan, sehingga memudahkan para pengguna informasi dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dari waktu ke waktu maupun dalam konteks perbandingan dengan pemerintah daerah lain. Sementara itu, indikator dapat dipahami memperoleh persentase tertinggi yaitu 72,63%, dan dikategorikan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan batas pemahaman para pengguna, disajikan secara sederhana, serta mendorong kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang tersedia.

Dengan demikian, laporan keuangan mampu disajikan secara jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas informasi bagi berbagai pihak yang membutuhkan

Secara keseluruhan, rata-rata persentase kualitas laporan keuangan adalah 71,41% yang berada pada kategori baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Meskipun demikian, capaian ini juga mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas laporan keuangan terutama pada indikator relevan. Hal ini penting karena indikator relevan berkaitan dengan sejauh mana informasi yang disajikan mampu memberikan manfaat prediktif, umpan balik, ketepatan waktu, serta kelengkapan data bagi para pengguna laporan keuangan. Jika indikator relevan dapat ditingkatkan, maka laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan.

3.3 Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berikut ini hasil analisis pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan menggunakan analisis regresi linier sederhana.

Tabel 3.

Hasil Uji Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Variabel	Koefisien Regresi (B)	Std. Error	t hitung	Sig. (p-value)	Keterangan
Konstanta	13,454	6,171	2,180	0,032	
Penatausahaan Aset Tetap (X)	0,827	0,071	11,681	0,000	Signifikan
R ²	0,636				

Sumber: Hasil olah data SPSS versi 25, 2023

Hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan adanya pengaruh positif antara penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan. Koefisien regresi sebesar 0,827 bertanda positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan kualitas penatausahaan aset tetap akan diikuti dengan peningkatan kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, semakin baik penatausahaan aset tetap yang dilakukan, maka semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan, dan sebaliknya. Lebih lanjut, nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,636 menunjukkan bahwa 63,6% variasi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat dijelaskan oleh variabel penatausahaan aset tetap, sedangkan sisanya 36,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, seperti sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, maupun penerapan standar akuntansi pemerintahan. Uji hipotesis memperkuat hasil tersebut, di mana nilai t_{hitung} (11,681) lebih besar daripada t_{tabel} (1,991) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti hipotesis nol (H₀) ditolak dan hipotesis alternatif (H₁) diterima, yang mengindikasikan bahwa penatausahaan aset tetap berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh temuan bahwa penatausahaan aset tetap berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tertib dan akurat proses penatausahaan yang dilakukan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penatausahaan aset tetap yang meliputi kegiatan inventarisasi, pembukuan, pelaporan, dan pengawasan terbukti menjadi faktor penting dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami, serta dapat dibandingkan, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sama halnya dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sundari, 2018), (Kumianto, 2017), (Anggraeni, 2015), (Widiati, E., 2021), (Reinelda, R., 2022), (Iqbal, 2022) dan

Kota Palembang (Maulana, 2022). Namun, penelitian ini secara khusus menyoroti bahwa penatausahaan aset tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan aset yang sistematis tidak hanya penting dari sisi pengendalian internal, tetapi juga menjadi komponen krusial dalam membentuk laporan keuangan yang kredibel dan dapat dipercaya. Dengan demikian, temuan penelitian ini semakin menegaskan bahwa penatausahaan aset tetap yang dilakukan secara sistematis, mulai dari proses pembukuan, inventarisasi, hingga pelaporan, tidak hanya penting dari sisi pengendalian internal, tetapi juga merupakan komponen krusial dalam membentuk laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal ini pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan yang kredibel, transparan, serta dapat dipercaya oleh berbagai pihak, baik auditor eksternal maupun masyarakat luas.

Penelitian ini membuktikan bahwa penatausahaan aset tetap merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Aset tetap yang tercatat dengan baik, akurat, dan sesuai dengan ketentuan akan meningkatkan aspek relevansi, keandalan, keterbandingan, serta kemudahan pemahaman laporan keuangan. Hal ini pada akhirnya mendukung terwujudnya laporan keuangan pemerintah yang transparan, akuntabel, serta dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan strategis di lingkungan Pemerintah Aceh.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Dari ketiga indikator tersebut, inventarisasi menjadi aspek yang paling menonjol, sedangkan pembukuan masih relatif lebih rendah sehingga memerlukan perhatian khusus untuk ditingkatkan. Selanjutnya, kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh yang diukur melalui indikator relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami juga berada pada kategori baik. Dari keempat indikator tersebut, aspek dapat dipahami memperoleh capaian tertinggi, sementara aspek relevan masih perlu diperkuat agar kualitas laporan semakin optimal. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan kontribusi sebesar 63,6%, yang berarti semakin baik penatausahaan aset tetap dilakukan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya difokuskan pada lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKK), sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh pemerintah daerah di Aceh. Selain itu, variabel penelitian terbatas pada penatausahaan aset tetap dengan tiga indikator utama, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, sehingga belum mengakomodasi faktor lain yang juga berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, serta pemanfaatan teknologi informasi. Keterbatasan penelitian ini juga terletak pada jangka waktu penelitian yang relatif singkat sehingga kedalaman analisis yang diperoleh masih terbatas.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)

Penulis menyadari bahwa penelitian ini merupakan langkah awal dalam memahami pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian ke pemerintah daerah lain di Provinsi Aceh atau bahkan di tingkat nasional guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian mendatang dapat menambahkan variabel lain seperti

kompetensi aparatur, efektivitas sistem informasi manajemen aset, serta pengawasan internal, agar analisis pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan lebih mendalam. Penelitian lanjutan dengan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) juga diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas terkait praktik penatausahaan aset tetap dan tantangan implementasinya dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada Kepala BPKK Kota Banda Aceh beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan izin, kesempatan, dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B. (2013). *Akuntansi Pemerintah* (Cetakan I). CV. Bumi Metro Jaya.
- Anggraeni, A. P. (2015). *Pengaruh penatausahaan barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo*. Universitas Brawijaya.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Febrianti, S. (2016). Analisis pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi*, 10(1), 151.
- Iqbal, M. (2022). *Pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Medan Area.
- Kumianto, O. D. (2017). *Pengaruh penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan (Studi kasus pada Pemerintahan Kabupaten Magelang)*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Maulana, E. S. (2022). *Pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Palembang*. Universitas Sriwijaya.
- Neuman, W. L. (2013). *Social Research Methods Qualitatives and Quantitatives Approaches, Seventh Edition*. Pearson and AB.
- Nurpadi, & H. (2021). Pengaruh penatausahaan aset tetap dan penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 55–.
- Reinelda, R., D. (2022). *Pengaruh penatausahaan aset terhadap kualitas laporan keuangan (Studi kasus pada BAPEDA Kabupaten Lombok Barat)*. Universitas Mataram.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sundari, R. (2018). *Pengaruh pengelolaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung*. Universitas Pasundan.

Suwanda, D. (2013). *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. PPM Management

Widiati, E., D. (2021). Pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 8(2), 77–8.

Yani, A. (2013). *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

